PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Harian Jogja | Hari: Kamis | Tanggal: 08 Mei 2014 | Halaman: 3

▸ JELANG LEBARAN

Pemkot Bentuk Tim Pengendali Gratifikasi

JOGJA-Mendekati Idulfitri, Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja membentuk Tim Pengendali Gratifikasi (TPG) untuk menghindari pejabat Pemkot terjerat hukum. TPG mulai bekerja pada Mei ini.

Inspektur Inspektorat Pemkot Jogja Wahyu Hidayat mengatakan, anggota TPG terdiri dari sejumlah anggota tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) namun sekretariatnya di Inspektorat. TPG nantinya akan meminta laporan dari pejabat yang menerima hadiah atau pemberian yang memiliki unsur suap. "Sederhana siapapun PNS yang menerima hadiah kategori suap atau tidak harus dilaporkan ke TPG," kata Wahyu saat ditemui seusai rapat di Kantor DPRD Kota Jogja, Selasa (6/5)

Wahyu mengakui, pejabat rawan terkena suap terutama yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat baik di tingkat SKPD maupun kelurahan. Tahun lalu Inspektorat menangani kasus dugaan suap di salah satu kelurahan kota Jogja dan sudah terselesaikan. Namun kelurahan mana Wahyu enggan menyebutkannya.

Wahyu menjelaskan, TPG juga bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memantau transaksi yang mencurigakan dari PNS. Namun sifatnya hanya bimbingan terkait gratifikasi.

Ditambahkan Wahyu, ada hal-hal yang diperbolehkan untuk PNS terkait pemberian atau hadiah dari orang lain. Di antaranya, sesuai surat edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diterima Inspektorat adalah hadiah langsung yang berlaku secara umum seperti voucher yang tidak terkait dengan kedinasan, hadiah atau keuntungan bunga investasi atau kepemilikan saham pribadi, hadiah yang diperoleh dari akademis atau non akademis seperti kejuaraan dengan biaya sendiri.

Wahyu mengaku upaya Pemkot ingin bebas dari unsur suap sudah sejak setahun lalu, namun TPG baru bisa diberlakukan tahun ini setelah dilakukan sosialisasi terlebih dahulu ke sejumlah PNS Pemkot Jogja.

Aktivis Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Hifzil Alim mengapresiasi Pemkot Jogja yang memiliki semangat pencegahan korupsi dari dalam. Hanya, Hifzil menilai TPG dalam perjalanannya nanti dikhawatirkan terjadi *conflict of interes* karena anggota TPG dari unsur PNS semua. "Kalau teman memeriksa teman sendiri bagaimana jadinya?" ucap Hifzil.

Hifzil menyarankan TPG bisa memasukkan anggota dari luar seperti dari akademisi, atau para ahli. Hal tersebut untuk mengurangi *conflict of interes*. Terlepas belum adanya anggota TPG dari unsur orang luar, Hifzil mengeapresiasi upaya pemkot Jogja mencegah korupsi. *(Ujang Hasanudin)*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005